EVALUASI PROGRAM SEKOLAH FILIAL PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KOTA PALEMBANG

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Pandji Azhari NIM. 07011381621105

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA Indralaya, Ogan Ilir 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH FILIAL PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1 KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

PANDJI AZHARI 07011381621105

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

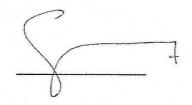
September 2020

Pembimbing I

<u>Dr. M. Husni Thamrin, M.SI</u> NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

<u>Drs. Gatot Budiarto, MS</u> NIP. 195806091984031002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul " Evaluasi Program Sekolah Filial Pendidikan Layanan Khusus di Lembaga Pembinuan Khusus Anak Klas I Kota Palembang" telah dipertahankan dihadapan T. m Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 02 Desember 2020.

Palembang, 02 Desember 2020.

Ketua:

1. Dr.M.Husni Thamrin, M.SI NIP. 196406061992031001

Anggota:

Mengetahui, Dekan FISIP

- 1. Drs. Gatot Budiarto, MS NIP. 195806091984031002
- 2. Drs. Joko Siswanto, M.SI NIP. 195706051985031003
- 3. Ermanovida, S.Sos., M.SI NIP. 196911191998032001

Prof. Dr. Kiagus/Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., N.P.A.

NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Banyak pendidikan saat ini yang berjalan sangat tidak efektif. Kita terlalu sering memberikan generasi muda rangkaian bunga dimana kita seharusnya mengajarkan mereka bagaimana menumbuhkan tanaman mereka sendiri"

(Jhon W.Gardner)

Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku, Nazaruddin dan Masyitha
- 2. Kakakku dan Adikku Tercinta, Nita Fitriani, Rizki Aprilia dan Muhammad Fajri Akbar
- 3. Sahabat dan Teman-temanku
- 4. Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Sekolah Filial Pendidikan Layanan Khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kota Palembang. Semua warga negara berhak mendapatkan Hak Pendidikan, tanpa terkecuali Anak-Anak yang sedang mengalami masa tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak hal ini guna mewujudkan pemerataan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi serta memahami dan mengetahui kelemahan, kelebihan dalam Pelaksanaan Program Sekolah Filial/Layanan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh LPKA Klas 1 Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data; Studi Kepustakaan, Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Formatif oleh Michael Scriven. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendidikan di LPKA Klas 1 Kota Palembang ini berjalan lancar dan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala/kelemahan baik dalam tahap pra-pembelajaran dan pasca-pembelajaran. Pada Dimensi Waktu, menunjukkan dalam penyusunan jam pelajaran sangat jauh apabila dibandingan dengan sekolah pada umumnya. Akibat dari waktu pembelajaran yang relative singkat ini berakibat kepada minimnya pelajaran akademik yang akan didapatkan oleh anak didik. Pada Dimensi Sarana dan Prasarana sudah terpenuhi dan layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) namun ada beberapa sarana dan prasarana pendukung/sekunder yang belum tersedia. Pada Dimensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan persiapan sudah sesuai dengan Standar Minimal Kompetensi yang telah diatur dalam dasar hukum, namun pada Tenaga Kependidikan Teknisi belum tersedia. Pada Dimensi Pengelolaan, dalam penerapan tujuan sudah dapat berjalan dengan baik, pada mekanisme penerimaan siswa baru sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun pada aspek penilian hasil belajar masih terdapat kendala yang disebabkan oleh kendala umur pada siswa terkait. Pada Dimensi Kurikulum sudah sesuai dengan amanat kurikulum 2013 yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kata Kunci : Sekolah Filial, Pengelolaan Pendidikan Layanan Khusus, LPKA Klas 1 Palembang

PEMBIMBING I

Dr.M.Hushi Thamrin, M.SI NIP. 196406061992031001 **PEMBIMBING II**

<u>Drs. Gatot Budiarto, MS</u> NIP. 195806091984031002

Palembang,

2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled Evaluation of the Special Service Education Filial School Program at the Class I Special Education Institution for Children in Palembang. All citizens are entitled to the right to education, without exception children who are experiencing a period of detention at the Special Development Institution for Children in order to realize equitable education. The purpose of this research is to evaluate and understand and know weaknesses, strengths in the implementation of the Filial School Program / Education Service Especially for the Class 1 LPKA Palembang City. The type of research that is used is descriptive qualitative research, with data collection techniques; Studies Bibliography, Observation, Documentation, and Interviews. Data analysis technique used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research using Formative Evaluation Theory by Michael Scriven. The results showed that in the process of implementing education in LPKA Class 1 Palembang City is running smooth and good, although there are still some obstacles / weaknesses in both stages pre-learning and postlearning. In the Time Dimension, show the inside the preparation of lesson hours is very far from being compared to schools in general. As a result of thislearning relatively shorttime resulted in minimal academic lessons that will be obtained by students. On the Dimension of Facilities and The infrastructure has been fulfilled and is suitable for use in teaching and learning activities (KBM), however, there are several supporting / secondary facilities and infrastructure that are not yet available. In the dimensions of teaching staff andeducation personnelpreparatoryare in accordance with Minimum Competency Standards that have been regulated in the legal basis, but on the Personnel Technician Education is not vet available. In the Management Dimension, in the implementation of objectives it can run well, the new student admission mechanism is appropriate with applicable law. But in the aspect of evaluating learning outcomes there are still constraints caused by age constraints on related students. On the Curriculum Dimensions is in accordance with the mandate of the 2013 curriculum which is regulated by the Minister of Education Regulation and Culture.

Keywords: Filial School, Management of Special Service Education, LPKA Class 1 Palembang

SUPERVISOR I

Dr.M.Husni Thamrin, M.SI

96406061992031001

SUPERVISOR II

Drs. Gatot Budiarto, MS

NIP. 195806091984031002

AS SA

2020 Palembang,

Chairman of the Department of Public Administration Faculty Social and Political Science

University Of Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA

NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya Panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul "Evaluasi Program Sekolah Filial Pendidikan Layanan Khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang" yang merupakan salah satu usaha penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Skripsi ini, saya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 2. Kedua Orang tua-ku tersayang, Nazaruddin dan Masyitha yang selalu mendidik, memberikan motivasi, dan semangat serta mendoakanku dalam setiap aktivitasku.
- 3. Kakakku dan adikku tersayang, Nita Fitriani, Rizki Aprilia, M.Fajri Akbar, Nisya Afliani Putri, Zahera Sefty, Gholib Mubarok yang telah membantuku dan mendukungku untuk tidak melupakan pengerjaan skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. M. Husni Thamrin. M.Si dan Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan masukan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.SI dan Ibu Dra.Martina, M.SI selaku dosen Pembahas Seminar Proposal yang telah memberikan masukan dan saran pada Proposal Usulan Skripsi saya selama ujian berlangsung.
- 6. Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si Selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan dan telah memberikan motivasi kepada saya dalam menjalani masa perkuliahan.
- 7. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
- 8. Selutuh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 9. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
- 10. Teman Teman Kuliahku, terkhusus Kabinet Op.Sp-ku yang telah menemaniku dan memberikan masukan-masukan kepadaku baik dalam proses pembuatan skripsi ini dan menemani hari-hariku dalam masa perkuliahan hingga sekarang.

- 11. Teman-Teman Seperantauan-ku Mamat, Edwin, Lady, Siska, Ulfa, Defry, Anggun, Nisa yang telah meluangkan waktu dan mengisi hari-hariku selama perkuliahan.
- 12. Temanku, Ranissa Arsadila, Cendy Faadhila, Fidilia Wijaya yang telah mengisi harihari kosongku.
- 13. Teman-Teman seperbimbingan Skripsi ku, Riva Annisa, Yasfin Nisa, dan Intan yang telah saling memberikan semangat dan dukungan pada saat masa bimbingan.
- 14. Teman-Teman Seperjuanganku Administrasi Publik 2016 yang telah memberikan semangat, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan Saran yang membangun kearah yang lebih baik untuk skirpsi ini dan maupun penulis, sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

Palembang, 13 Februari 2021

Pandji Azhari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	•••••
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Konsep Manajemen Publik	
2. Tinjauan Evaluasi Program	
3. Metode dan Rancangan Evaluasi Program	
4. Tinjauan Metode Evaluasi	
5. Tinjauan Formatif Evaluasi Model	
6. Tinjuan Pelaksanaan Sekolah Filial	
B. Penelitian Terdahulu	
C. Kerangka Pemikiran	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	
B. Definisi Konsep	
C. Fokus Penelitian	
D. Jenis dan Sumber Data	
E. Informan Penelitian	
F. Teknik Pengumpulan Data	
G. Teknik Keabsahan Data	
H. Teknik Analisis Data	
	•••••
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	
Sejarah Singkat LPKA	
2. Kapasitas Ruangan	
3. Visi dan Misi LPKA	
4. Tujuan dan Sasaran	
5. Asas Pembinaan	
6. Tata Keria	

	7.	Struktur Organisasi	43
	8.	Rekapitulasi Pegawai	48
B.		alisis dan Interpretasi Data	49
		Waktu Pelaksanaan Program	49
	2.	Sarana dan Prasarana Penunjang Program	55
	3.	Sumber Daya Manusia	62
		Bentuk Pengelolaan	70
	5.	Penyesuaian Kurikulum	80
BAB V	V PE	ENUTUP	
A.	Kes	simpulan	86
		an	88
DAFT LAMI		PUSTAKA	90
		111	

DAFTAR TABEL

Tabel	Н	alaman
1.	Jumlah Anak di LPKA Palembang	. 7
2.	Jumlah Murid di Sekolah LPKA	. 7
3.	Matrik Kebutuhan Tenaga Pendidik Penyelenggaraan PLK	. 25
4.	Penelitian Terdahulu	. 29
5.	Fokus Penelitian	. 34
6.	Jumlah Guru/Tutor di Sekolah Filial LPKA Klas 1	. 48
7.	Kesenjangan Penetapan Waktu Pelaksanaan	. 52
8.	Sarana dan Prasarana yang Belum Tersedia diSekolah Filial LPKA	. 61
9.	Matrik Kebutuhan Tenaga Kependidikan Pengelenggaraan PLK	. 64
10.	Daftar Guru Sekolah Filial Tahun 2019	. 65
11.	. Daftar Tenaga Kependidikan Sekolah Filial	. 68
	Rekapitulasi Siswa Sekolah Filial	
13.	Kurikulum Sekolah Filial	. 81
14.	Struktur Kurikulum SD/MI	. 83
15.	Struktur Kurikulum SMP/Mts	. 84
16.	Struktur Kurikulum SMA/MA	. 86

DAFTAR GAMBAR

Gamb	oar	Halaman
1.	Jumlah Anak Pidana Se-Indonesia	3
2.	Keadaan di Luar Ruang Kelas SMP dan SMA Filial	5
3.	Kondisi Salah Satu Kelas di dalam lokal SMP dan SMA	5
4.	Kondisi Luar Lokal SD N 25 Filial LPKA Klas 1	6
5.	Kondisi Salah Satu Ruangan Kelas dalam Lokal SD N 25 Filia	6
6.	Kerangka Berpikir Berdasarkan Teori Evaluasi Formatif Scriven	31
7.	Halaman Depan LPKA Kelas 1 Kota Palembang	39
8.	Struktur Organisasi	47
9.	Dokumentasi Pembagian Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran SMP	50
10	0. Dokumentasi Pembagian Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran SMA .	51
1.1	1. Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar	53
12	2. Ruang Perpustakaan Sekolah Filial	58
13	3. Laboratorium Komputer	59
14	4. Sarana Kelas	59
15	5. Ruang Guru	60
16	5. Tempat Duduk Outdoor	60
17	7. Bentuk Pelaporan Hasil Belajar Anak Didik	73
18	8. Kerjasama Pendidikan Kesetaraan dengan Pihak SKB Banyuasin	75
19	9. Kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB	78
20	0. Kunjungan Kepala Dinas Kependidikan Kota Palembang	79
21	1. Jadwal Pelajaran SMP N 22 Filial	82
22	2. Jadwal Pelajaran SMA N 11 Filial	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010
- 2. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PAS-43.PR.01.02 Tahun 2016
- 3. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing
- 4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- 5. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- 6. Lembar Revisi Seminar Proposal 1
- 7. Lembar Revisi Seminar Proposal 2
- 8. Lembar Revisi Seminar Proposal 3
- 9. Surat Permohonan Izin Penelitian
- 10. Surat Izin Penelitian Kementerian Hukum dan HAM
- 11. Surat Perintah Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang
- 12. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi 1
- 13. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi 2
- 14. Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- 15. Pedoman Wawancara

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

LPKA : Lembaga Pembinaan Khusus Anak

HAM : Hak Asasi Manusia

Lapas : Lembaga Pemasyarakatan PLK : Pendidikan Layanan Khusus

SELFI : Sekolah Filial

FILIAL : Jarak Jauh / Terpisah (KBBI)
ABH : Anak Berurusan dengan Hukum
MOU : Memorandum Of Understanding

Kanwil : Kepala Wilayah Andikpas : Anak Didik Lapas SD : Sekolah Dasar

SMP : Sekolah Menengah PertamaSMA : Sekolah Menengah AtasSOP : Standar Operasional Prosedur

POSDCORB : Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,

Reporting, Budgeting

UPT : Uni Pelaksana Teknis SKB : Seleksi Kompetensi Bidang BAPAS : Balai Pemasyarakatan

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Pentingnya pendidikan bagi masyarakat dalam diantaranya pendidikan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang luas bagi manusia. Di Indonesia sendiri tantangan utama dalam pendidikan ialah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan amanat dari konsitusi pada Pasal 28C, ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" yang artinya pendidikan harus diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh umur,tempat, dan waktu. Dengan demikian, pemerintah selaku pelaksana pemerintahan harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial ataupun geografis.

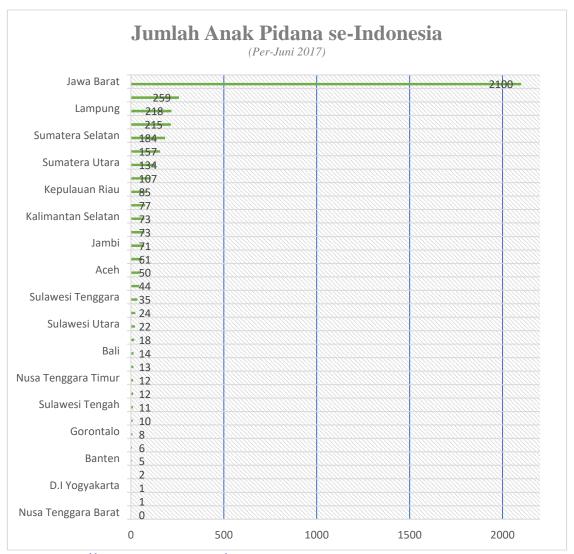
Namun pada kenyataannya pemerataan pendidikan belum bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan amanat konstitusi tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, baik dari faktor ekonomi, faktor keluarga, maupun faktor sumber daya manusia yang belum memadai. Pendidikan seharusnya dapat di akses oleh semua anak bangsa. Semua anak bangsa berarti semua anak yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia dimana pun ia berada, tak terkecuali anak-anak yang berada dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anaka (LPKA) merupakan lembaga pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik setelah masa penahanan diselesaikan.

Lembaga Pembinaan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehinga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Konsep LAPAS/LPKA itu sendiri merupakan hasil dari pergeseran atau pergantian dari konsep sebelumnya yaitu Penjara, perubahan ini telah terjadi sejak istilah penjara tidak lagi digunakan pada era 70an, dan kemudian diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan. Perubahan nama ini juga membawa perubahan bagi perlakuan dan konsep pembinaan bagi warga lapas.

Penegasan terhadap hak anak yang berada didalam lapas untuk mendapatkan pendidikan, tertuang pada Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu terdapat pada lampiran Bab 3. Namun hal ini sering di abaikan ataupun kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pada Tahun 2016 Tercatat dalam Database Ditjen Permasyarakatan Kemenkum dan HAM total dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 2.361 anak pidana. Namun yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), LP, maupun Rutan hanya berjumlah 929 anak atau hanya berjumlah 39% dari keseluruhan ABH. Sementara itu yang mengikuti pelatihan keterampilan hanya 175 anak atau 7% dari dari Jumlah ABH itu sendiri. Dari angka tersebut artinya terdapat 65% narapidana anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan mereka. Berdasarkan data tahun 2017, Jumlah anak yang dibina didalam lapas terus bertambah. Pemerintah selaku pengayom masyarakat, harus lebih memperhatikan anak – anak penerus bangsa yang ada didalam lapas, dengan membuat dan menyusun sistem yang dapat mendukung terciptakanya pendidikan yang baik dan adil bagi Anak yang berhadapan

dengan hukum ini. Berikut ini data Jumlah Anak Pidana se-Indonesia yang di olah oleh Lokadata.id dan bersumber dari Kemenkum dan HAM RI.

Gambar 1. Jumlah Anak Pidana Se-Indonesia



Sumber: https://lokadata.beritagar.id/

Dari data tersebut menunjukan bahwa provinsi terbanyak yang memiliki jumlah anak pidana atau Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) ialah Jawa Barat dengan jumlah anak pidana sebanyak 2,1rb anak. Sedangkan Sumatera Selatan berada pada posisi 5 dengan jumlah anak pidana sebanyak 184 anak. Pemerintah selaku pelayan masyarakat dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalah-permasalahan serupa dengan memunculkan trobosan atau inovasi yang dapat menyelesaikan dan mengurangi permasalahan tersebut. Pemerintah Kota Palembang, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat telah

mengambil komitmen untuk dapat menyelesaikan masalah ini, dengan cara menciptakan sebuah inovasi baru dibidang Pendidikan. Inovasi tersebut ialah Sekolah Filial/Pendidikan Layanan Khusus di LPKA Klas I Palembang yang diluncurkan semenjak Agustus 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan hak pendidikan bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pendidikan formal, melalui pendidikan formal ini anak – anak penghuni LPKA tetap dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka masing-masing. Pendidikan ini memberikan kesempatan bagi anak – anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut dapat merasakan pendidikan yang sama dengan teman -teman sebayanya tanpa ada perlakuan yang kurang maupun lebih saat dalam proses mengajarnya. Program ini pula menyajikan kurikulum yang sama dengan sekolah formal, namun juga dibekali dengan pembentukan karakter, serta pengembangan berbagai keahlian pada siswanya. Guru – Guru yang mengajar didatangkan dari sekolah – sekolah negeri pilihan yaitu;

- a. SD Negeri 25 Palembang
- b. SMP Negeri 22 Palembang
- c. SMA Negeri 11 Palembang

Penetapan sekolah – sekolah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah kota dan provinsi yang sebelumnya telah menandatangani MOU dengan pihak Kanwil Kemenkum HAM provinsi Sumatera Selatan yaitu No. W6.PAS.2.PK.01.06.05-0313 dan No. 000/2810/26.8/PN/2014. Penandatanganan MOU dengan pihak Pemerintah kota ditujukan penunjukan dan penugasan sekolah untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan penandatanganan MOU dengan Pemerintah Provinsi ditujukan untuk penunjukan urusan sekolah untuk jenjang SMA. MOU ini dimulai sejak 2014 yaitu semenjak diciptakan dan dijalankannya program ini, MOU tersebut secara berkala diperbaharui setiap 2 tahun dengan periode (2014-2016), (2016-2018).

Gambar 2. Keadaan di Luar Ruang Kelas SMP dan SMA Filial



Sumber: Dokumentasi Peneliti pada LPKA Kelas 1 Kota Palembang

Gambar tersebut menunjukan keadaan dari luar ruangan untuk jenjang sekolah SMP 22 dan SMA 11 Filial yang terdapat pada LPKA kelas 1 Kota Palembang, dimana didalam ruangan tersebut terdapat ruangan-ruangan kelas yang nantinya digunakan oleh masingmasing kelas dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Gambar 3. Kondisi Salah satu kelas didalam lokal SMP dan SMA



Sumber : Dokumentasi Peneliti pada LPKA Kelas 1 Kota Palembang

Dari gambar tersebut, bisa dilihat sarana dan kelengkapan dari salah satu kelas dalam Lokal SMP dan SMA Filial kelas 1 Kota Palembang hanya terdapat beberapa meja dan kursi yang ada, sesuai dengan jumlah murid pada kelas tersebut.

Gambar 4. Kondisi Luar Lokal SD N 25 Filial LPKA Kelas 1 Kota Palembang



Sumber : Dokumentasi Peneliti pada LPKA Kelas 1 Kota Palembang

Gambar tersebut merupakan kondisi diluar ruangan untuk SD N 25 Filial yang ada di LKPA Kelas 1 Kota Palembang, yang didalamnya terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai tempat belajar mengajar tiap jenjang kelas oleh AndikPas, dimana dari gambar tersebut terdapat beberapa tempat yang bisa digunakan untuk duduk.

Gambar 5. Kondisi Salah satu Ruangan kelas dalam Lokal SD N 25 Filial



Sumber: Dokumentasi Peneliti pada LPKA Kelas 1 Kota Palembang

Gambar 5 menunjukan kondisi dari salah satu ruangan kelas yang ada dalam lokal SD N 25 Filial pada LPKA Klas 1 Kota Palembang, dimana di dalamnya terdapat beberapa kursi dan meja untuk guru, papan tulis, dan kipas. Hal ini menunjukan bahwa pembuatan sekolah ini tidak hanya digunakan sebagai suatu pemenuhan kewajiban olek LPKA dalam menjalankan Pendidikan bagi anak-anak di LPKA namun juga didukung dengan keseriusan dalam menjalankannya.

Tabel 1. Jumlah Anak di LPKA Palembang (2019)

Status Penghuni	Jumlah
Anak Pidana	84
Anak tahanan	5
Jumlah	89

Sumber: Dokumen Lapas Anak kelas 1 kota Palembang

Data tersebut merupakan data pertahun 2019, dimana jumlahnya lebih didominasi oleh anak pidana yang berjumlah 84 orang anak. Anak-anak tersebut memiliki latar belakang umur dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan database Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kota palembang, berikut ini jumlah dari murid sekolah filial dari periode 2014-2019 yang dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan mereka. :

Tabel 2. Jumlah Murid di Sekolah (2014-2019)

No.	Tingkat	Tahun Ajaran				
		2014 - 2015	2015 – 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 – 2019
1.	SD	53	60	20	17	11
2.	SMP	82	59	28	30	18
3.	SMA	46	52	40	52	26
Jumlah		181	171	88	99	55

Sumber: Dokumen LPKA Klas 1 kota Palembang

Pada tabel 1. disebutkan bahwa jumlah anak yang berada didalam Lapas anak terdapat 89 orang, namun apabila dilihat dalam tabel 2 jumlah anak didik lapas (AnDikPas) hanya berjumlah 55 Orang. Hal tersebut menandakan bahwa tidak semua anak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak masuk menjadi Anak Didik Lapas (Andikpas) dan jumlah anak yang tidak mengikuti pendidikan berjumlah 34 orang anak atau sebesar 61% dari jumlah keseluruhan anak, dilansir dari argumen pihak lapas hal tersebut terjadi karena anak-anak tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan berupa Akte kelahiran, rapot jenjang pendidikan terakhir, ijazah terakhir serta kartu keluarga. Data tersebut berasal dari Kepala Bagian Keterampilan dan Pendidikan LPKA.

"Dalam penyelenggaraan kebijakan sekolah filial ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu; Fasilitas bangunan dan sarana penunjang, anggaran, peserta didik dan standar penyelenggaraan pendidikan" (Ardinda,2019:72). Selain itu Nyimas dalam penelitiannya mengenai pengelolaan Program sekolah filial mengatakan bahwa

"Penyelenggara dalam hal ini kepala LPKA dan masing-masing sekolah diharuskan untuk memiliki komitmen dalam memaksimalkan sekolah filial agar mencapai keberhasilan yang maksimal, selain itu diperlukan perhatian lebih dalam rencana anggaran tiap tahunnya agar tidak ada lagi bahan-bahan pokok pendidikan yang tidak tersedia. Diperlukan orientasi atau pemberian pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan selain itu kerjasama dan sinergitas antar lembaga perlu diperkuat dalam pelaksanaan program kerjasama ini." (Nyimas,2018:128)

Dari kedua penelitian tersebut bisa ditarik sebuah benang merah dimana terdapat beberapa masalah atau isu-isu yang perlu diteliti, yaitu mengenai Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana sekolah, serta upaya kerjasama yang dilakukan agar pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam kedua penelitian tersebut sayangnya, terdapat beberapa masalah yang belum dijelaskan secara rinci dan mendalam yaitu mengenai bagaimana Waktu pelaksanaan pendidikan, Tenaga Kependidikan, Bentuk Penilaian Hasil belajar, Mekanisme dalam mengikuti Ujian Nasiona, Serta Bentuk Kerjasama antar lembaga.

Diperlukan suatu penelitian yang dapat mendeskirpsikan dan membantu memahami bagaimana praktek dari pelaksanaan program sekolah filial ini, selain itu juga penelitian ini juga diharapkan kedepannya dapat menjadi bahan acuan baik bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya tentang kekurangan/kelemahan ataupun kekuatan/kelebihan yang ada selama Program ini dilaksanakan. Setelah kekurangan dan kelebihan itu ditemukan, diharapkan juga bisa mempermudah pihak pelaksana dalam melakukan evaluasi atau dalam proses pengambilan keputusan dalam memperbaiki Program ini kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengetahui bahwa masalah yang akan dibahas dan dipecahkan dalam Penelitian ini nantinya ialah ; Bagaimana Proses Pendidikan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kota Palembang dalam melaksanakan Program Sekolah Filial/ Layanan Pendidikan Khusus?

C. Tujuan Peneltian

Tujuan penelitian kualitatif ini ialah sebagai upaya untuk mengevaluasi serta memahami dan mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam Pelaksanaan Program Sekolah Filial/Layanan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh LPKA Klas 1 Kota Palembang untuk semua orang yang ada didalam lingkungan LPKA. Pada tahap penelitian ini, sekolah filial secara umum dapat di definisikan sebagai pelaksanaan pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Sekolah jarak jauh ini ditujukan bagi peserta didik didaerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana sosial dan yang tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat – manfaat yang akan didapatkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu

1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan konsep konsep dalam Proses Evaluasi
 Program dan Mengevaluasi Program Sekolah Filial / Pendidikan Layanan
 Khusus Anak Berbasis Inklusi pada LPKA Klas 1 Kota Palembang
- b. Sebagai alat penambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca terkait pelaksanaan Program Sekolah Filial Layanan Pendidikan Anak Berbasis Inklusi pada LPKA Kelas 1 Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Porgram Sekolah Filial ini kedepannya apabila didalam penelitian ini kedepannya ditemukan atau terdapat masalah dan hambatan yang menghalangi program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi baik terhadap pengawai maupun badan yang melaksanakan program Sekolah Filial ini agar terciptanya suatu program yang sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arikunto, S. Jabar, S.A. 2014. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Ardinda, Ade Afrilia dan Roy Valiant. 2019. *Analisis Faktor-Faktor penyelenggaraan kebijakan sekolah filial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Palembang*. Jurnal Administrasi Publik: 72-86
- Abdulmuid, Muhibbudin. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Pengging Mangkunegara
- Arifin, Zainal. 2019. Evaluasi Program: Teori dan Praktek dalam Konteks Pendidikan dan NonPendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Jakarta. 282 hal.
- Fatchurahman, M. 2017. Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling. Palangka Raya
- Feriyanto, A. & Triana, E.S. 2019. *Pengantar Manajemen (3 in 1) Untuk Mahasiswa dan Umum.* Yogyakarja: Mediantera
- Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Rusdiana. 2014. Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Sub Direktorat Pendidikan. 2016. *Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus*. Indonesia: Direktorat Jendral Pemasyarakatan
- Terry, G. R. 2016. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- W. Creswell, John. 2016. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yenti, Septi Damai. 2019. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Osf.io

Peraturan-peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Layanan Khusus kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor PAS-43.PR.01.02 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 yaitu perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Dokumen

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016